

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

The Effect of Degree of Decentralization Ratio, Regional Financial Dependence Ratio, and SiLPA Financing Rate Ratio on Capital Expenditure Allocation in Regencies/Municipalities of West Java Province

Yulistiani Marlianita

Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

Email : yulistiani.marlianita.amp16@polban.ac.id

Suji Abdullah Saleh

Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

Email: suji.abdullah@polban.ac.id

Abstract: *This research aimed to be examine the significant effect indicator of financial performance, namely the degree of decentralization ratio, dependency level ratio, and SiLPA financing rate ratio on the allocation of capital expenditure in the regencies/ municipalities in West Java Province. The data used in this study was secondary data consisting Statement of Budget Realization of 27 regencies/ municipalities in West Java Province 2014-2018 which were obtained from report of audit findings (LHP) by national Audit Board (BPK) of West Java Province. Data analysis method in this research used Random Effect Model (REM) by using Eviews 9 software. The results of this study show that simultaneously the degree of decentralization ratio, regional financial dependence ratio, and SiLPA Financing rate ratio has a significant effect on the allocation of capital expenditures. However, partially the degree of decentralization ratio and regional financial dependence ratio does not has a significant effect on the allocation of capital expenditure while the SiLPA financing rate ratio has a significant effect on the allocation of capital expenditure in regencies/ municipalities in West Java Province with a coefficient determination value is 0.437352.*

Keywords: *Degree of Decentralization, Financial Dependency Ratio, Rate of Financing of SiLPA, Capital Expenditure Allocation*

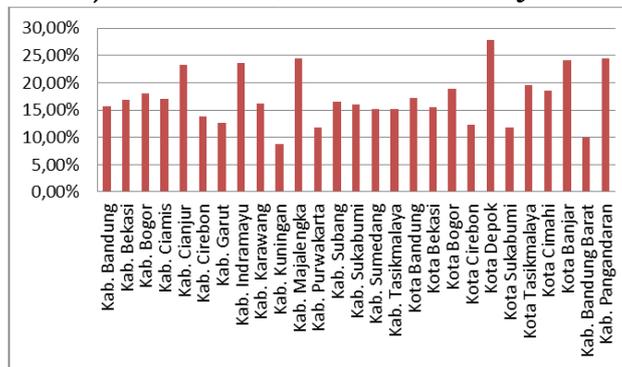
1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian mengalami perubahan kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya. Pengelolaan yang dimaksud yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi. Keberadaan dari otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan barang dan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam

menggali dan memanfaatkan segala potensi, baik itu sumber daya alam maupun kekayaan asli daerah lainnya sehingga daerah dapat meningkatkan kemandiriannya. Tujuannya tidak lain adalah agar pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita daerah, karena dari peningkatan tersebut dapat dilihat adanya tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2015). Agar hal tersebut dapat terwujud, tentunya pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas investasi melalui alokasi belanja modal yang lebih besar. Menurut Fakhry (2017) porsi alokasi belanja daerah untuk belanja modal dicerminkan melalui rasio belanja modal. Dalam menyusun anggaran untuk belanja daerah, khususnya belanja modal, tentunya daerah akan menghadapi masalah alokasi terkait dengan sumber daya, karena tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Hidayat (2013) mengatakan dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan penerimaan yang diterimanya untuk belanja daerah yang produktif.

Grafik I.1 Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



Sumber: Hasil olah data LHP LKPD BPK - 2018

Dari grafik I.1 di atas dapat dilihat jika rata-rata alokasi belanja modal yang diprosikan dengan belanja modal terhadap belanja daerah pada 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang Pemerintah Pusat harapkan yaitu sebesar 30% sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, yang mengatakan jika besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal sekurang-kurangnya atau lebih dari 30% sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014. Rasio alokasi belanja modal tertinggi tahun 2018 yaitu ditempati oleh Kabupaten Depok sebesar 27,85%. Meskipun pengalokasian anggaran untuk belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok memiliki nilai yang tertinggi, namun hal ini belum bisa dikatakan baik karena belum memenuhi proporsi yang ideal. Kondisi ini tentunya menunjukkan jika masih rendahnya perhatian pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan yang ada di daerah.

Menurut Hidayat (2013) banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi untuk belanja daerah, antara lain yaitu faktor masalah politik, kondisi keuangan daerah, dan perilaku oportunistis para pemangku kebijakan. Faktor yang dapat diukur secara empiris adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan keuangan daerah (Syahadat, 2018). Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa penentuan besaran belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) (Halim, 2012).

2. Kajian Pustaka

2.1 Analisis Rasio Keuangan

2.1.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Halim (2001) analisis rasio keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, hal ini dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan beberapa rasio keuangan pemerintah daerah dengan rasio keuangan pemerintah daerah lainnya yang paling mendekati ataupun dengan daerah yang memiliki potensi daerah yang relative sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya (Ardhini, 2011).

2.1.2 Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Menurut Halim (Gerungan, 2007:126) tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah dengan analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan serta perkembangan baik perolehan maupun pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.3 Jenis Rasio Keuangan

Berikut merupakan rasio keuangan yang digunakan di dalam penelitian ini:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total pendapatan APBD. Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$RDD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan dengan besarnya pendapatan transfer dibandingkan dengan pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2016:140).

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA

SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto. Di dalam pasal 1377 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Rasio SiLPA terhadap belanja merupakan persentase porsi belanja yang tidak terserap atau tertunda atau rasio yang menunjukkan proporsi SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk belanja daerah pada tahun berjalan (DJPk, 2014). Rasio tingkat pembiayaan SiLPA dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$RTPS = \frac{SiLPA}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

2.2 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Menurut Halim (2016:2014), belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang berjalan bisa dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:163).

$$Rasio\ BM = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ dalam\ APBD} \times 100\%$$

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yang diantaranya meliputi:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) sampai peralatan dan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan

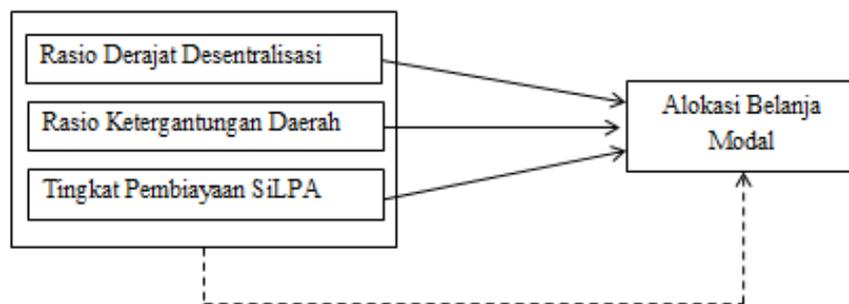
untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2014 menghimbau daerah untuk mengalokasikan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari total belanja daerah. Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) menemukan bahwa penetapan alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) (Halim, 2012). Berikut ini merupakan kerangka pemikiran didalam penelitian ini:



Gambar II. 2 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berikut merupakan hipotesis yang telah di rumuskan di dalam penelitian ini:

- Ha₁ : Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- Ha₂ : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- Ha₃ : Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- Ha₄ : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi

anggaran yang penulis peroleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat selama lima tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 27 kabupaten/kota, sehingga metode analisis di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan dari software *Eviews 9*. Analisis regresi data panel di dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan yang diprosikan dalam rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan persamaan regresi data panel di dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

- Y = Alokasi belanja modal
- α = Konstanta atau *intercept*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Rasio Derajat Desentralisasi
- X₂ = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- X₃ = Rasio tingkat Pembiayaan SiLPA
- ϵ = error, variabel pengganggu
- i = periode waktu
- t = individu/entitas

Menurut Widarjono (2007, 251) dalam mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat tiga teknik atau model yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan terhadap semua variabel dependen maupun variabel independen yang digunakan. Berikut ini merupakan hasil deskriptif statistik dengan menggunakan *Eview 9*:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.199779	0.205498	0.558922	0.101057
Median	0.190100	0.163000	0.583000	0.084800
Maximum	0.369700	0.463100	0.752400	0.381600
Minimum	0.088400	0.050100	0.337400	0.000000
Std. Dev.	0.054630	0.105140	0.095483	0.068379

Sumber: hasil pengolahan data dengan Eviews 9

Dari tabel 4.1 memperlihatkan hasil statistik deskriptif dari variabel alokasi belanja modal (Y), rasio derajat desentralisasi (X1), rasio ketergantungan keuangan daerah (X2), dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA (X3) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat jika rata-rata nilai dari alokasi belanja modal sebesar 0,199779 atau 19,97%, rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi sebesar 0,205498 atau 20,55% yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan berada pada kategori sedang, rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 0,558922 atau 55,89% menunjukkan jika masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat berupakana perimbangan, dan rata-rata nilai rasio tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 0,101057 atau 10,10%.

4.2 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linier data panel yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Random Effect Model (REM)*. Penentuan metode REM sebagai metode analisis regresi linier ini didasarkan pada uji Chow dan uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan persamaan regresi di dalam penelitian ini:

$$ABM = 0,226639 - 0,120036RDD - 0,083000RKD - 0,437352TPS + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,226639 menunjukkan bahwa apabila nilai dari variabel independen yang meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 0 atau tetap, maka nilai alokasi belanja modal akan tetap yaitu sebesar 0,226639 atau 22,66%.
- b. Koefisien regresi variabel X_1 atau rasio derajat desentralisasi sebesar -0,120036 menunjukkan setiap peningkatan rasio derajat desentralisasi sebesar satu satuan maka nilai alokasi belanja modal akan menurun sebesar 0,120036.
- c. Koefisien regresi variabel X_2 atau rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar -0,083000 menunjukkan apabila terjadi peningkatan rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar satu satuan maka nilai alokasi belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 0,083000.
- d. Koefisien regresi variabel X_3 atau rasio tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 0,437352 menunjukkan apabila nilai rasio tingkat pembiayaan SiLPA mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai alokasi belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,437352.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *random effect model*. Berikut merupakan hasil pengujian regresi dengan *random effect model*:

Tabel 4.2 Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.226639	0.047488	4.772516	0.0000
X1	-0.120036	0.070466	-1.703448	0.0909
X2	-0.083000	0.065017	-1.276584	0.2040
X3	0.437352	0.075289	5.808965	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.034046	0.5063
Idiosyncratic random			0.033617	0.4937
Weighted Statistics				
R-squared	0.231401	Mean dependent var	0.080701	
Adjusted R-squared	0.213799	S.D. dependent var	0.037768	
S.E. of regression	0.033488	Sum squared resid	0.146909	
F-statistic	13.14666	Durbin-Watson stat	1.592430	
Prob(F-statistic)	0.000000			

1. UjisSignifikansi ParameterIndividual (Uji t)

Hasil pengujian t menunjukkan nilai t_{hitung} rasio derajat desentralisasi lebih besar dari nilai negatif t_{tabel} (-1,703448 > -1,97824) yang berarti jika H_{01} diterima, yang memiliki arti apabila rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasil nilai t_{hitung} rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai negatif t_{tabel} (-1,276584 > -1,97824) sehingga dapat diambil kesimpulan jika H_{02} diterima atau rasio ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Sementara nilai t_{hitung} rasio tingkat pembiayaan SiLPA yang lebih besar dari t_{tabel} ($5,808965 > 1,97824$) yang menunjukkan jika H_03 ditolak dan H_a3 diterima, yang berarti bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dari tabel 4.2 yang merupakan hasil dari regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* diperoleh nilai F-statistik sebesar 13,14666 dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 serta pada tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$, $k = 4$, dan $n = 135$ diperoleh nilai F-tabel yaitu sebesar 2,67. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diketahui jika nilai F-statistic $> F$ -tabel ($13,14666 > 2,67$) dan nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$ ($0,000000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan jika H_05 ditolak atau variabel independen di dalam penelitian ini yang meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan hasil regresi data panel seperti yang terdapat pada tabel 4.2 diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R-Square sebesar 0,213799 atau 21,38% nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh variabel rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA hanya sebesar 21,38% sedangkan sisanya yaitu sebesar 78,62% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi (X1) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)

Berdasarkan dari hasil uji signifikansi masing-masing parameter individual (t) diperoleh hasil jika hipotesis H_{a1} ditolak atau menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan data rasio desentralisasi yang telah diolah penulis sebelumnya yang menunjukkan jika sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori kurang dalam melaksanakan desentralisasi fiskal atau besaran kontribusi dari PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah, sehingga PAD yang diperoleh oleh daerah lebih dialokasikan untuk belanja lain selain belanja modal seperti belanja rutin dan belanja operasional. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang mengatakan bila sumber pendapatan yang diterima daerah dari PAD jumlahnya kecil, sehingga penggunaannya lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dan belanja rutin serta PAD tidak terlalu menunjang untuk belanja modal serta didukung dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2017) yang menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara empiris terhadap alokasi belanja modal. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti (2018) dan Praza (2016) yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

4.4.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)

Hasil dari estimasi regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *random effect model*

diperoleh keputusan jika hipotesis H_02 diterima dan H_a2 ditolak yang memiliki arti jika secara empiris terbukti jika rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ataupun kenaikan alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan besaran pendapatan dana perimbangan yang berasal dari DAU memberikan kontribusi yaitu hampir sebesar 60% yang penggunaannya lebih banyak digunakan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional. Sementara, besaran dari DAK fisik yang digunakan untuk penguatan fisik seperti infrastruktur yang sekaligus menjadi sumber pembiayaan untuk menutup alokasi belanja modal sebesar 30% nilainya kecil, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh pada alokasi belanja modal (hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Anggaran dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartika dkk (2017) dan Novita (2020) yang menemukan bahwa secara empiris rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan hasil penelitian dari Fakhry (2017) menemukan jika rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja namun ke arah negatif.

4.4.3 Pengaruh Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA (X3) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Y)

Hasil dari uji signifikansi parameter individual (t) variabel rasio tingkat pembiayaan SiLPA dapat diambil keputusan jika hipotesis H_a3 diterima. Hal tersebut menunjukkan jika rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 43,74%. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti (2018) dan Novita (2020) yang menemukan jika rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Jika dilihat dari nilai SiLPA pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu lima tahun, nilainya terus meningkat. Kenaikan dari nilai SiLPA ini menunjukkan jika adanya peningkatan jumlah pendapatan sehingga terjadi surplus anggaran, adanya anggaran belanja pada tahun yang bersangkutan tidak terealisasi, atau kemungkinan daerah melakukan penghematan anggaran. Rata-rata nilai SiLPA tahun yang bersangkutan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat relatif besar, hal ini terwujud karena pencapaian realisasi dari pendapatan kabupaten/kota selama kurun waktu 5 tahun yang cenderung melebihi target. Kemudian jika dilihat dari rata-rata nilai rasio tingkat pembiayaan SiLPA yaitu sebesar 10,11%, ini menunjukkan jika besarnya nilai proporsi SiLPA tahun sebelumnya digunakan kembali untuk mendanai belanja daerah tahun berjalan yang salah satunya yaitu belanja modal. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menyatakan bila besarnya SiLPA tahun lalu akan digunakan kembali untuk merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi masyarakat yang salah satunya berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah.

4.4.4 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* diperoleh hasil jika variabel independen yang meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi Kabupaten Sumedang yang mengatakan jika besaran nilai alokasi belanja modal akan meningkat

ketika sumber pendapatan yang diterima daerah mengalami peningkatan secara bersamaan. Adapun besarnya pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA yaitu sebesar 21,38%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 78,62% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor gaya kepemimpinan yang meliputi program/kegiatan pemerintah daerah, faktor partisipatif anggaran, faktor dari isu-isu strategis yang ada di daerah, faktor gagal lelang, faktor penundaan pekerjaan, faktor dari pihak ketiga yang tidak melaksanakan pekerjaan, kapasitas fiskal daerah, serta masuknya anggaran belanja modal ke dalam pos belanja barang dan jasa (Hasil wawancara dengan beberapa Pemerintah Daerah).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi atau besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori yang masih rendah, sehingga penggunaan PAD hanya dapat digunakan untuk menutup belanja yang bersifat rutin meskipun nilai dari PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan.
- b. Rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat jika masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, namun tingginya kontribusi dana perimbangan tidak mampu merubah struktur belanja modal.
- c. Kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan besarnya SiLPA tahun lalu yang terbentuk karena tidak terealisasinya belanja akan digunakan kembali untuk merealisasikan belanja yang salah satunya yaitu untuk belanja modal guna menunjang program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- d. Variabel rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar “21,38% sedangkan sisanya yaitu sebesar 78,62% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor gaya kepemimpinan yang meliputi program/kegiatan, partisipatif anggaran, isu-isu strategis yang ada di daerah, faktor gagal lelang, faktor penundaan pekerjaan, faktor dari pihak ketiga yang tidak melaksanakan pekerjaan, kapasitas fiskal daerah (Hasil wawancara dengan beberapa Pemerintah Daerah).

Daftar Pustaka

BUKU

- Arsyad, Lincolin. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta. Bappenas, 2004.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit

Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematisa Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabetaaa

JURNAL nDANsSKRIPSI

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). Diunduh dari <<http://eprints.undip.ac.id/>>

Fakhry, Syahadat Muhammad. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung. Diunduh dari <<http://digilib.unila.ac.id>>

Fatimah, Siti. 2019. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017. Diunduh dari <<https://digilib.polban.ac.id>>

Gerungan, Silvia Febriany dkk. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara. Diunduh dari <<https://ejournal.unstrat.ac.id>>

Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Diunduh dari <<https://jimfeb.ub.ac.id>>

Indiyanti, Ni Made Deni. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. Jurnal Manajemen UNUD. Diunduh dari <<https://unud.ac.id>>

Novira, dkk. 2017. Analisis Faktor-Faktor Dalam Struktur APBD Dan Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. <<https://www.neliti.com/publications/2350>>

Novita, Irma. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). <<http://journal.ubpkarawang.ac.id>>

Praza, Eko Indra. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Diunduh dari <<https://online-journal.unja.ac.id>>.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014